

ABSTRAK

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebijakan strategis nasional yang bertujuan mendukung pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat serta mewujudkan perlindungan terhadap hak atas kesehatan. Dalam pelaksanaannya, Program MBG melibatkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sehingga diperlukan pembagian kewenangan yang jelas, khususnya dalam aspek standardisasi dan pengawasan. Permasalahan penelitian ini berangkat dari adanya kecenderungan sentralisasi dalam penetapan kebijakan dan standar nasional, sementara pelaksanaan program berlangsung di tingkat daerah. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kesenjangan dalam koordinasi, pengawasan, dan tindakan korektif ketika terjadi pelanggaran terhadap standar keamanan pangan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Bangkalan dalam standardisasi dan pengawasan Program MBG serta merumuskan konsep ideal rekonstruksi kebijakan pembagian kewenangan untuk mewujudkan efektivitas dan akuntabilitas program.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara preskriptif dengan menggunakan teori negara hukum, teori kewenangan, serta konsep teori pengawasan *bestuursdwang*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian kewenangan dalam penyelenggaraan Program MBG cenderung menempatkan Pemerintah Pusat sebagai pemegang peran utama dalam perumusan kebijakan, penetapan standar, dan pengendalian program. Sementara itu, Pemerintah Daerah, termasuk Pemerintah Kabupaten Bangkalan, memiliki kewenangan atribusi dalam bidang kesehatan dan pangan. Namun, pengaturan yang berlaku belum secara tegas mengintegrasikan hasil pengawasan Pemerintah Daerah dengan pengambilan keputusan administratif terhadap penyelenggara MBG. Akibatnya, ruang Pemerintah Daerah untuk melakukan tindakan korektif secara cepat masih terbatas. Oleh karena itu, konsep ideal pembagian kewenangan perlu direkonstruksi melalui model standardisasi nasional, pengawasan kolaboratif, dan pertanggungjawaban berjenjang. Dalam model tersebut, Pemerintah Pusat tetap berwenang menetapkan kebijakan dan standar nasional, sedangkan Pemerintah Daerah diberikan kewenangan operasional yang lebih tegas dalam melakukan inspeksi, penanganan insiden, perlindungan penerima manfaat, serta penghentian sementara distribusi makanan dalam keadaan darurat. Rekonstruksi tersebut diharapkan dapat mewujudkan penyelenggaraan Program MBG yang lebih efektif, responsif, akuntabel, dan memiliki kepastian hukum.

Kata Kunci: Pembagian Kewenangan, Pemerintah Pusat dan Daerah, Standardisasi, Pengawasan, Makan Bergizi Gratis.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, karunia, dan penyertaan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Standardisasi dan Pengawasan Program Makan Bergizi Gratis di Daerah Bangkalan.” Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya kejelasan pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis. Sebagai program strategis nasional, penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis memerlukan standardisasi dan sistem pengawasan yang efektif untuk menjamin keamanan pangan, kualitas makanan, serta pemenuhan standar gizi bagi penerima manfaat. Dalam pelaksanaannya di daerah, pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjadi persoalan penting, terutama dalam menentukan batas kewenangan, mekanisme koordinasi, serta tindakan yang dapat dilakukan ketika ditemukan permasalahan dalam penyelenggaraan program. Melalui penelitian ini, penulis berupaya untuk mengkaji pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Bangkalan dalam standardisasi dan pengawasan Program Makan Bergizi Gratis. Selain itu, penelitian ini juga berupaya merumuskan konsep ideal atau rekonstruksi kebijakan pembagian kewenangan yang dapat mendukung penyelenggaraan program secara lebih efektif, responsif, dan akuntabel. Dengan adanya pembagian kewenangan yang jelas dan mekanisme pengawasan yang

terkoordinasi, diharapkan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis dapat memberikan perlindungan yang optimal bagi masyarakat sebagai penerima manfaat. Penulis menyadari bahwa proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dukungan, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan terima kasih, penulis menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT, yang telah memberikan kelancaran, kemudahan jalan berproses, kesempatan berkembang individu yang sangat luar biasa bagi penulis untuk menempuh pendidikan di perguruan tinggi Universitas Trunodjoyo Madura sampai akhirnya dapat menyelesaikan segala persyaratan akademis dengan baik;
2. Rasulullah SAW, sebagai panutan dalam hidup berkeimanan dan selalu di jalan yang benar;
3. Kedua Orang Tua, Junjang Bayu Parmadi dan Siti Amina yang selalu support saya baik secara mental, biaya, dan segala perbuatan baik saya serta menuntun agar terus tetap menjadi pribadi yang baik dan beretika;
4. R. Wahjoe Poernomo Soeprapto, S.H., M.H., yang telah membimbing penelitian hingga skripsi kepada penulis dengan sangat cermat dan teliti;
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura yang telah memberikan ilmu dan arahan untuk menyelesaikan skripsi dengan baik;

6. Kepada Adik Tersayang : Shela Mita Zhahbina. Terima kasih telah menjadi sumber kebahagiaan dan semangat dalam segala hal. Teruslah berjuang dan jadilah pribadi yang selalu membawa kebanggaan bagi keluarga ;
7. Rekan sehati dan seperjuangan, Abdul Warits Riyadi Ali, Arief Anshori, Ghazi, Fahrur Rozi, Fazil Mubaarok, Ibnu Nafi, dan Mohammad Sofan Hidayatulloh yang telah menemani serta membantu dalam menyelesaikan dan menyempurnakan skripsi penulis;

Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya sebagai bahan masukan dalam pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam standardisasi dan pengawasan Program Makan Bergizi Gratis. Penulis juga berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan kebijakan dan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis yang lebih efektif dan akuntabel.

Bangkalan,.....

Rahmad Alief Pharmadi

DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	1
HALAMAN PERSETUJUAN	2
HALAMAN PENGESAHAN.....	3
PERNYATAAN KEASLIAN.....	4
ABSTRAK	5
KATA PENGANTAR.....	6
DAFTAR ISI.....	9
BAB I PENDAHULUAN.....	11
1.1 Latar Belakang Masalah.....	11
1.2 Rumusan Masalah	19
1.3 Tujuan Penelitian	19
1.4 Kegunaan penelitian.....	19
1.5 Keaslian penelitian	20
1.6 Metode Penelitian.....	22
1.6.1 Jenis Penelitian.....	22
1.6.2 Pendekatan Penelitian	22
1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	24
1.6.4 Metode Analisa Bahan Hukum	26
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI MENGENAI PEMBAGIAN KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH DALAM STANDARDISASI DAN PENGAWASAN PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS.....	28
2.1 Teori Negara Hukum (<i>Rechtsstaat</i>)	28
2.2 Teori Pengawasan (<i>Bestuursdwang</i>).....	32
2.3 Teori Kewenangan	36
BAB III PENGATURAN PEMBAGIAN KEWENANGAN DAN ANALISIS KESENJANGAN DALAM STANDARISASI SERTA PENGAWASAN PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS DI KABUPATEN BANGKALAN	40
3.1 Pengaturan Pembagian Kewenangan Standardisasi dan Pengawasan Program Makan Bergizi Gratis	40

3.2 Konsep Ideal Rekonstruksi Kebijakan Pembagian Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk Mewujudkan Efektivitas dan Akuntabilitas Program Makan Bergizi Gratis di Masa Mendatang	52
BAB IV PENUTUP	66
4.1 Kesimpulan	66
4.2 Saran.....	67
Daftar pustaka.....	70